



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Kegagalan Meksiko sebagai Negara dalam Menghadapi
Kehadiran Kartel Narkoba**

Skripsi

Oleh

Vania Veda Kirana

6092001207

Bandung

2024



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Kegagalan Meksiko sebagai Negara dalam Menghadapi
Kehadiran Kartel Narkoba**

Skripsi

Oleh

Vania Veda Kirana

6092001207

Pembimbing

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han)

Bandung

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

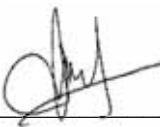
Nama : Vania Veda Kirana
Nomor Pokok : 6092001207
Judul : Kegagalan Meksiko sebagai Negara dalam Menghadapi Kehadiran Kartel Narkoba

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 25 Januari 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

: 

Sekretaris

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han)

:  6/2-24

Anggota

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vania Veda Kirana
NPM : 6092001207
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : Kegagalan Meksiko sebagai Negara dalam Menghadapi Kehadiran Kartel Narkoba

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 2 Januari 2024



Vania Veda Kirana

ABSTRAK

Nama : Vania Veda Kirana
NPM : 6092001207
Judul : Kegagalan Meksiko sebagai Negara dalam Menghadapi
Kehadiran Kartel Narkoba

Negara mengalami kerapuhan karena kehilangan efektivitas dan legitimasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab miliknya. Negara menjadi rapuh karena banyak mengalami kegagalan dalam proses penyelenggaraan negara, salah satunya ketika memberikan pelayanan publik atau produk politik kepada masyarakatnya. Pada saat ini, Meksiko menghadapi situasi negara rapuh karena lemahnya otoritas pemerintah dalam menegakkan hukum. Celah ini diisi oleh aktor non-negara yang berusaha untuk mengambil peranan pemerintah. Aktor tersebut adalah kartel atau kelompok kriminal terorganisasi lainnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian **“Bagaimana kegagalan Meksiko dalam mempertahankan otoritasnya terhadap kehadiran kartel narkoba?”** Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep *fragile state* dan *state failure* guna melihat dan menunjukkan indikator-indikator yang membuat negara mengalami kerapuhan atau kegagalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan analisis terhadap suatu peristiwa melalui data dan teori. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Meksiko sering mengalami kegagalan dalam upaya penegakan hukum akibat lemahnya kelembagaan negara sehingga memudahkan otoritas miliknya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya pejabat yang melakukan aksi korupsi sehingga peranan lembaga pemerintah kosong dan kartel mengambil alih fungsi tersebut. Kedua, kemampuan dari kartel untuk menyediakan produk politik dinilai sebagai peringan beban pemerintah, di mana hal ini tidak dianggap demikian oleh masyarakat karena justru mengurangi opsi masyarakat dalam memilih kebutuhan hidup akibat sifat kartel yang kejam. Terakhir, Pemerintah Meksiko belum menemukan langkah dan solusi yang tepat dalam menangani kegiatan kartel sehingga implementasi kebijakan sering membawa dampak negatif.

Kata Kunci: negara rapuh; kegagalan negara; kartel narkoba; Meksiko; produk politik

ABSTRACT

Name : Vania Veda Kirana
Student ID : 6092001207
Title : *Mexico's National Failure in Handling the Existence of Drug Cartels*

*The state becomes fragile as it loses effectiveness and legitimacy in carrying out its functions and responsibilities. The state becomes fragile because there are many failures in the process of state administration, one of which is when providing public services or political products to its people. Currently, Mexico is facing a fragile state situation due to the government's weak authority in enforcing the law. This gap is filled by non-state actors who try to take on the role of the government. These actors are cartels or other organized criminal groups. Based on this statement, this research aims to answer the research question "**How does Mexico fail to maintain its authority over the existence of drug cartels?**" To answer this question, this research uses the concepts of fragile state and state failure to see and show the indicators that make the state experience fragility or failure. This research uses a qualitative method, which analyzes an event through data and theory. The results of this study show that Mexico often fails in its law enforcement efforts due to weak state institutions that undermine its authority. This is due to the fact that many officials are corrupt, leaving the role of government institutions empty and cartels taking over. Secondly, the ability of cartels to provide political products is seen as easing the burden on the government, which is not perceived as such by the public as it reduces people's options in choosing the necessities of life due to the ruthless nature of cartels. Lastly, the Mexican government has yet to find the right steps and solutions in dealing with cartel activities, and policy implementation often has a negative impact.*

Keywords: *fragile state; state failure; drug cartel; Mexico; political product*

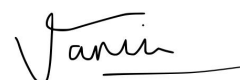
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melakukan dan menyelesaikan penelitian yang berjudul “Kegagalan Meksiko sebagai Negara dalam Menghadapi Kehadiran Kartel Narkoba” untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini dilakukan demi memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada pembaca terkait pentingnya peranan dari setiap aktor dalam suatu negara, baik individu maupun kelompok, terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan penyelenggaraan negara. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa aktor non-negara merupakan sosok yang datang dari masyarakat, tetapi kemudian mampu untuk membentuk kelompok kriminal dengan kekuatan besar. Sehingga, melalui penelitian ini, penulis berharap masyarakat di suatu negara tidak memandang sebelah mata terkait kehadiran setiap individu maupun kelompok dan juga turut serta dalam mengawasi proses penyelenggaraan negara.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman baru kepada para pembaca. Penelitian ini belum sepenuhnya sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun di masa depan.

Bandung, 4 Januari 2024



Vania Veda Kirana

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang memungkinkan penulis untuk dapat melaksanakan penelitian ini dan menyelesaikannya secara baik dan tepat waktu. Penelitian ini juga dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Mama, Papa, dan Kakak-kakak**, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga masa penulisan skripsi.
2. **Dosen Pembimbing**, Mba Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han). Terima kasih Mba Vrames telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, membimbing, dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.
3. **Dosen Penguji**, Mas Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M. Si. dan Mas Idil Syawfi, S.IP., M.Si. Terima kasih telah memberikan ilmu dan masukan terhadap penelitian ini.
4. **Jajaran Dosen UNPAR**, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu-ilmunya yang diberikan sehingga penulis dapat memiliki wawasan baru selama mengenyam pendidikan di UNPAR.
5. **Teman-teman Mahasiswa UNPAR**, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman dan berjuang bersama di UNPAR.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	8
1.2.3 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Kajian Literatur.....	10
1.5 Kerangka Pemikiran.....	14
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.6.1 Metode Penelitian.....	21
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.7 Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II.....	25
2.1 Aktivitas Kartel Narkoba dan Intervensi Pemerintah Meksiko.....	26
2.1.1 Aktivitas Kartel Sinaloa di Meksiko.....	26
2.1.2 Aktivitas Kartel Jalisco New Generation.....	28
2.1.3 Kebijakan Pemerintah Meksiko dalam Penanganan Kartel Narkoba... 30	
2.2 Kartel Narkoba dan Pengaruhnya terhadap Keamanan Meksiko.....	34
BAB III.....	43
3.1 Lemahnya Pemerintah Meksiko dalam Menerapkan Kebijakan Anti Narkoba.....	44
3.2 Kegagalan Pemerintah Meksiko dalam Menyediakan Produk Politik.....	45
3.2.1 Kegagalan Pemerintah Meksiko dalam Menyediakan Keamanan dan	

Mempertahankan Kelembagaan Negara.....	46
3.2.2 Kegagalan Pemerintah Meksiko dalam Dunia Pendidikan.....	53
3.2.3 Kegagalan Pemerintah Meksiko dalam Menjamin Kesehatan Masyarakat.....	56
3.2.4 Kegagalan Pemerintah Meksiko dalam Mencegah Monopoli Pasar... 60	
3.3 Ketidakmampuan Meksiko sebagai Negara dalam Menjalankan Otoritasnya.....	62
BAB IV.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
CJNG	: Jalisco New Generation Cartel
DEA	: Drug Enforcement Administration
FBI	: Federal Bureau of Investigation
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV/AIDS	: Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome
OECD	: Organization for Economic Cooperation and Development
OCDEF	: Organized Crime Drug Enforcement Task Forces
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PRI	: Institutional Revolutionary Party

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Alur Perdagangan Narkotika dan Zona Operasional di Meksiko.....	37
Gambar 2.2: Daerah yang Mengalami Konflik antara Kartel.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara merupakan sebuah entitas yang terdiri atas wilayah, masyarakat, dan pemerintahan.¹ Dalam penyelenggaraannya, negara memegang kuasa atas keberlangsungan berbagai aktivitas yang terjadi dalam lingkup domestik. Negara memiliki wewenang untuk menerapkan hukum-hukum melalui berbagai kebijakan serta peraturan yang sekiranya dapat mendukung kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pemberlakuan hukum tersebut juga menjadi batasan terhadap sesuatu yang boleh atau tidak boleh masyarakat lakukan.² Sehingga, dapat dikatakan bahwa negara terdiri atas kumpulan institusi yang menetapkan hukum sebagai batasan-batasan aktivitas atau interaksi antar kelompok maupun individu dalam lingkup wilayah kedaulatannya.³

Secara umum, negara berfungsi untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, menyediakan keamanan melalui implementasi hukum yang melindungi keberadaan masyarakat. Hal ini dapat diterapkan dengan adanya kekuatan militer dalam menjaga keutuhan wilayah negara atau kepolisian yang hadir di tengah kehidupan masyarakat. Dengan adanya keamanan sebagai salah satu hasil produk politik, maka masyarakat tidak merasa takut untuk menjalankan

¹ Michael R. Fowler dan Julie M. Bunck, "What constitutes the sovereign state?," *Review of International Studies* 22, no. 4 (1996): 381, doi:10.1017/s0260210500118637.

² Ibid, 389.

³ Andrew Goldsmith, "Policing Weak States: Citizen Safety And State Responsibility," *Policing and Society* 13, no. 1 (2002): 7, doi:10.1080/1043946032000050553.

aktivitasnya di negara tersebut.⁴ Masyarakat tidak merasa takut akan ancaman yang terjadi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain itu, negara juga berfungsi untuk menyediakan kebutuhan dasar hidup, misalnya memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga bantuan ekonomi.⁵ Kebutuhan dasar hidup juga meliputi peranan negara dalam menyadari dan mengakui permasalahan yang terjadi di dalam wilayahnya, misalnya yaitu maraknya perdagangan dan penggunaan narkoba. Negara memiliki otoritas untuk menghadapi ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri. Pada kasus narkoba, transaksi yang terjadi dapat melibatkan banyak aktor non-negara karena bukan hanya dilakukan dalam skala domestik, tetapi juga mampu untuk berkembang menjadi skala internasional sehingga permasalahan ini penting untuk menjadi perhatian banyak pihak.

Ancaman terkait dengan narkoba juga dapat dibawa kepada kerja sama internasional, misalnya yang dilakukan oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam memerangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif.⁶ Kerja sama ini dilakukan bukan hanya memiliki tujuan untuk mengamankan setiap negara dari penyalahgunaan narkoba, tetapi juga menjaga kestabilan dan keamanan kawasan dalam jangka waktu yang cukup panjang atau juga dapat bersifat keberlanjutan. Oleh karena itu, negara memiliki otoritas untuk

⁴ Ibid, 3.

⁵ Ibid, 7.

⁶ Pratap Parameswaran, "Combating and Preventing Drug and Substance Abuse," ASEAN, 29 April 2000, <https://asean.org/combating-and-preventing-drug-and-substance-abuse-by-pratap-parameswaran/>.

merumuskan dan menerapkan sejumlah kebijakan dengan menyesuaikan kondisi negaranya dan juga situasi yang mampu ditimbulkan oleh negara lain di kawasan.

Meskipun memiliki tugas untuk mendukung kehidupan masyarakat, masih terdapat beberapa negara yang tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut. Misalnya yaitu negara yang dipengaruhi oleh kuasa sindikat kriminal, geng, hingga kartel sebagai kelompok kriminal terorganisasi. Dampak yang ditimbulkan yaitu munculnya ketidaknyamanan bagi anggota masyarakat lainnya. Akses terhadap pelayanan publik menjadi sulit karena meningkatnya angka kekerasan. Hal ini terjadi bersamaan dengan melemahnya jasa keamanan yang diberikan oleh negara.

Jasa keamanan yang diberikan oleh negara perlahan mengalami kelemahan karena adanya kekurangan dalam mencukupi kebutuhan operasional sehari-hari. Misalnya pada institusi kepolisian, negara tidak lagi menyanggupi kebutuhan terhadap ratusan atau bahkan ribuan anggotanya. Kebutuhan dasar yang diperlukan oleh anggota polisi seperti pelatihan, kendaraan bermotor, peralatan komunikasi, senjata, hingga sel tahanan tidak dapat disediakan sesuai dengan standar minimumnya.⁷ Pada akhirnya, anggota polisi yang berdedikasi pun tidak dapat menjalankan kewajibannya secara layak karena kebutuhan dasar yang menunjang pekerjaannya tidak bisa terpenuhi.

⁷ Goldsmith, 10.

Karena secara perlahan negara tidak mampu memberikan keamanan dan perlindungan kepada masyarakat secara baik, maka muncul aktor non-negara yang berusaha untuk mengisi peran tersebut. Masyarakat pun di sisi lain juga berpaling kepada tokoh-tokoh yang mampu memberikan keamanan baginya.⁸ Karena keamanan menjadi hal yang langka, maka sektor negara lainnya pun terkena dampaknya. Infrastruktur hancur hingga akses kepada kebutuhan dasar menjadi sulit. Pada akhirnya, hal ini juga memengaruhi kondisi sosial masyarakat, di mana banyak terjadi konflik yang berkepanjangan.⁹

Pada kasus Meksiko, pemerintahan yang korup menjatuhkan berbagai sektor penting negara. Kejahatan di publik tidak lagi diselesaikan secara netral oleh kepolisian karena adanya keterlibatan pemerintah, penggunaan senjata menjadi umum, hingga perdagangan narkoba mengalami peningkatan. Berbagai kartel di Meksiko terus mengalami perkembangan melalui kompetisi, yaitu saling berkonflik satu sama lain. Konflik antar kartel membuat terjadinya peningkatan pada angka pembunuhan, yakni sebanyak 30 kali lipat dari tahun 2005 sampai 2012.¹⁰ Meskipun telah melakukan *war on drugs* atau perang terhadap narkoba, pengaruh kartel tetap ada sampai saat ini dan terus berkembang menjadi lebih kuat.

⁸ Robert I. Rotberg, "The new nature of nation-state failure," *The Washington Quarterly* 25, no. 3 (2002): 87, doi:10.1162/01636600260046253.

⁹ Ibid, 86.

¹⁰ Adam D. Morton, "The War on Drugs in Mexico: a failed state?," *Third World Quarterly* 33, no. 9 (2012): 1631, doi:10.1080/01436597.2012.720837.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Negara yang memiliki tugas dan kewajiban untuk melayani dan menyediakan kebutuhan masyarakat, nyatanya tidak lagi berfungsi sebagaimana harusnya di Meksiko. Kartel di Meksiko terus mengalami perkembangan, salah satunya melalui kompetisi antara kartel-kartel. Selain itu, sebagai kelompok kriminal terorganisasi, kartel-kartel di Meksiko juga menjalin kerja sama dengan penjara, geng jalanan, hingga tentara bayaran.¹¹ Hal ini yang membuat keberlangsungan aktivitasnya dapat berjalan secara lancar.

Persaingan tersebut bukan hanya melibatkan kartel-kartel saja, tetapi juga polisi dan militer. Pemerintah yang bersifat korup tidak berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan antar kartel, tetapi justru memanasakan konflik di antaranya.¹² Hal ini berdampak kepada kehidupan masyarakat yang tidak lagi merasa aman dan nyaman sehingga akhirnya muncul berbagai masalah dalam struktur sosial. Kehidupan sosial di antara masyarakat juga pada akhirnya menimbulkan banyak ketidakharmonisan yang secara jelas tidak menjadi perhatian dari pemerintah.¹³ Karena hal ini, kondisi sosial di Meksiko terus memburuk karena konflik tidak lagi terjadi antara masyarakat saja, tetapi juga masyarakat dengan pemerintah.

¹¹ Robert J. Bunker dan John P. Sullivan, "Cartel evolution revisited: third phase cartel potentials and alternative futures in Mexico," *Small Wars & Insurgencies* 21, no.1 (2010): 31, doi:10.1080/09592310903561379.

¹² Ibid, 30.

¹³ Rotberg, 86.

Kartel di Meksiko sendiri lebih sulit untuk dihilangkan karena bersifat ko-opsi, berbeda dengan kartel di negara lain, misalnya adalah Kolombia yang bersifat kompetitor.¹⁴ Ko-opsi sendiri memiliki arti bahwa kemunculannya di negara berusaha untuk merebut kekuasaan pemerintah, bukan sekedar hadir untuk menyaingi kuasa pemerintah. Dengan sifat yang ko-opsi seperti ini, maka besar kemungkinan kartel-kartel di Meksiko untuk menyatukan kekuatannya dan mengambil alih kuasa pemerintah. Pada akhirnya, tujuan dari kartel-kartel terus bersaing satu sama lain, yaitu untuk memiliki kekuasaan yang setingkat dengan negara, di mana dapat memudahkan berbagai kegiatannya, baik secara domestik maupun internasional.

Dalam memasarkan narkoba, kartel-kartel asal Meksiko memiliki jaringan internasional yang mempekerjakan ribuan orang. Dilansir dari LA Times, pada September 2023 jumlah anggota aktif milik kartel-kartel di Meksiko menyampai sekitar 175 ribu orang, di mana mereka dipekerjakan sebagai pembudidaya opium, penjaga laboratorium metamfetamin dan fentanil, hingga menjadi gembong narkoba yang menjalankan jaringan penyelundupan global.¹⁵ Pada Kartel Sinaloa dan Jalisco New Generation, diperkirakan terdapat 45 ribu pekerja dan rekan atau mitra yang tersebar di lebih dari 100 negara. Banyaknya lapangan pekerjaan yang dibuka

¹⁴ Bunker dan Sullivan, 35.

¹⁵ Patrick J. McDonnell, "How many people work for the Mexican drug cartels?," Los Angeles Times, 21 September 2023, <https://www.latimes.com/world-nation/story/2023-09-21/how-many-people-work-for-the-mexican-drug-cartels>.

membuat kartel menduduki peringkat lima sebagai pemberi lapangan pekerja terbesar di Meksiko.¹⁶

Selain melakukan perdagangan narkoba, kartel juga menjalankan kegiatan kriminal lainnya, seperti pemerasan, penculikan, pencurian bahan bakar, dan penyelundupan migran.¹⁷ Sehingga, hal ini yang memungkinkan bagi kartel untuk memiliki jumlah pekerja yang sangat besar tadi. Selain itu, karena bertambahnya aktivitas dan dilakukan oleh banyak orang, pada September 2023 pendapatan kartel diestimasi mencapai 6 miliar dolar AS dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan.¹⁸ Oleh karena itu, melalui aktivitas perdagangan ilegal ini membuat kartel-kartel di Meksiko terus ingin memiliki kekuasaan agar kegiatannya dapat berjalan dan berkembang.

Oleh karena itu, penulis mengidentifikasi masalah terkait dengan posisi Pemerintah Meksiko yang terus mengalami kelemahan. Karena maraknya korupsi, maka akhirnya hanya sedikit anggota pemerintah yang berada di pihak masyarakat. Hal ini tentunya membuka peluang bagi kartel untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah demi memperlancar aktivitasnya. Contoh nyatanya, yaitu ketika pemerintah berhasil dibayar oleh kartel, hal ini membuat fungsi negara akhirnya terkikis dan merusak ikatan dan hubungan politik domestik.¹⁹ Karena institusi pemerintah yang

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid, 34.

terus melemah, ditambah dengan perkembangan kartel yang signifikan, maka lambat laun Meksiko akan kehilangan otoritasnya sebagai negara.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Terdapat tiga fokus yang dianalisis pada penelitian ini. Pertama, penelitian ini memiliki fokus utama untuk mengetahui faktor-faktor di balik lemahnya legitimasi Pemerintah Meksiko yang membuat kehadiran kartel terus berkembang. Kedua, unit analisis utama dalam penelitian ini adalah Pemerintah Meksiko dan kartel-kartel yang berada di Meksiko. Kedua unit analisis ini diteliti untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap Meksiko sebagai negara dan juga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Meksiko. Ketiga, periode penelitian ini dibatasi dalam rentang waktu tahun 2006 ketika Pemerintah Meksiko menyatakan *war on drugs* atau *war on cartel* hingga tahun 2023 saat tulisan ini dibuat.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut, “Bagaimana kegagalan Meksiko dalam mempertahankan otoritasnya terhadap kehadiran kartel narkoba?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin membuktikan bahwa Meksiko mengalami kelemahan karena negara kehilangan efektivitas dan legitimasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Sektor-sektor negara yang menjadi penopang kesejahteraan masyarakat tidak berjalan secara baik. Kelembagaan pemerintah yang lemah akibat tindakan korupsi, wilayah negara yang dikuasai oleh aktor non-negara, hingga masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahnya memberikan dampak negatif kepada otoritas Meksiko sebagai negara.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait dengan signifikansi peranan suatu organisasi kejahatan internasional terhadap negara, masyarakat, dan juga negara di sekitarnya. Sehingga, baik itu masyarakat maupun pemerintah, dapat mengetahui dampak dari aktivitas suatu organisasi kejahatan, terutama jika organisasi tersebut berada di sekitar kehidupan masyarakat. Penulis juga berharap tulisan ini dapat menambah literatur terkait penyebab dari negara yang mengalami sebuah kegagalan.

1.4 Kajian Literatur

Pada penelitian ini, penulis melakukan kajian literatur terhadap artikel jurnal tentang Meksiko yang terkait dengan daerah teritori, populasi, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Empat hal tersebut dikaji melalui beberapa literatur karena merupakan hal yang mendasar bagi suatu negara untuk dapat menjalankan aktivitasnya. Namun, di Meksiko terdapat permasalahan terhadap empat hal tersebut sehingga membuat otoritasnya kian melemah. Kajian literatur yang dilakukan ingin memperlihatkan bahwa lemahnya Meksiko sebagai negara telah melonggarkan otonomi pemerintah atas wilayahnya, memburuknya penyediaan layanan publik, tingginya aksi korupsi di pemerintahan, dan negara lain yang meragukan kemampuan Meksiko dalam menyelenggarakan kebijakannya.

Literatur pertama ditulis oleh Benjamin Laughlin dengan judul "*Border Fences and the Mexican Drug War.*" Laughlin menjelaskan bahwa pagar atau tembok yang dibangun setelah kebijakan *war on drugs* diimplementasikan, yakni dari tahun 2007 hingga 2011 yang melintang sepanjang 649 mil di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko tidak berkontribusi terhadap penurunan angka penyelundupan narkoba.²⁰ Akibat dari pembangunan tembok ini, pembunuhan banyak terjadi karena rute alternatif untuk masuk ke AS menjadi wilayah yang diperebutkan. Laughlin berpendapat bahwa negara tidak mampu dalam mencegah

²⁰ Benjamin Laughlin, "Border Fences and the Mexican Drug War," *Unpublished manuscript*, (2019).

aktivitas kartel-kartel narkoba karena dibuktikan dengan tingginya kontrol wilayah yang dimiliki oleh kartel sehingga mampu menciptakan pertempuran dan perebutan wilayah.²¹

Literatur kedua ditulis oleh Roy Boyd, Maria E. Ibararan, dan Roberto Vélez-Grajales dengan judul *“Institutional Weakness and the Spread of Drugs and Violence.”* Tulisan ini melihat bahwa penggunaan narkoba di AS dan Meksiko telah meningkatkan angka kematian akibat overdosis, aktivitas geng, dan kejahatan terkait narkoba.²² Narkotika merupakan salah satu sektor yang sangat menguntungkan dari segi ekonomi sehingga penulis berpendapat bahwa langkah awal pemberantasan harus dimulai dari Meksiko yang melakukan reformasi pada kelembagaan pemerintahannya. Bersamaan dengan hal ini, perlu adanya suntikan dana terhadap pembangunan ekonomi sehingga masyarakat Meksiko tidak lagi dikooptasi oleh penguasa kartel dan kelompok kejahatan lainnya.²³

Literatur ketiga ditulis oleh Nubia Nieto dengan judul *“Political Corruption and Narcotrafficking in Mexico.”* Nieto dalam tulisannya berargumen bahwa perdagangan narkoba dapat berlangsung secara lama karena adanya kepentingan dari AS dan proses ini berjalan di bawah kegiatan politik Meksiko yang banyak terjadi aksi korupsi.²⁴ Meksiko

²¹ Ibid.

²² Roy Boyd, Maria E. Ibararan, dan Roberto Vélez-Grajales, “Institutional Weakness and the Spread of Drugs and Violence,” *Understanding the Mexican Economy*, (2018), <https://doi.org/10.1108/978-1-78769-065-320181012>.

²³ Ibid.

²⁴ Nubia Nieto, “Political Corruption and Narcotrafficking in Mexico,” *Transcience* 3, no. 2 (2012).

memperbolehkan penggunaan obat-obatan jenis opioid, kokain, dan marijuana untuk alasan medis. Tulisan ini berargumen bahwa kekuasaan satu partai di Meksiko, yakni Institutional Revolutionary Party (PRI) menciptakan kondisi monopoli politik sehingga membuat terjadinya kelonggaran pemerintah dalam mengawasi peredaran obat-obatan. Kekuasaan PRI di Meksiko menjadi salah satu alasan beberapa jenis obat-obatan yang penggunaannya berada dalam pengawasan menjadi dapat diperjualbelikan dan diselundupkan ke berbagai negara. Oleh karena itu, korupsi dan perdagangan narkotika merupakan hal yang penting dalam memulihkan legitimasi pemerintah melalui lembaga peradilan dan politik.²⁵

Literatur keempat ditulis oleh David A. Kuhn dan Robert J. Bunker dengan judul *“Just where do Mexican cartel weapons come from?”* Tulisan ini menjelaskan bahwa kemunculan Kartel Los Zetas di tahun 1990 memunculkan perlombaan senjata antara kartel-kartel di Meksiko sehingga membuat kekuatan kartel pada saat ini bersifat seperti militer pada umumnya.²⁶ Persenjataan yang dimiliki oleh kartel-kartel di Meksiko bukan hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dalam negeri melalui penegak hukum di Meksiko yang membelot atau melakukan kerja sama dengan kartel. Oleh karena itu, penegak hukum di Meksiko sulit untuk memerangi kartel-kartel yang ada karena terjadinya keseimbangan

²⁵ Ibid.

²⁶ David A. Kuhn dan Robert J. Bunker, “Just where do Mexican cartel weapons come from?,” *Small Wars & Insurgencies* 22, no. 5 (2011).

kekuatan, baik dari segi persenjataan maupun kemampuan anggota dalam hal operasi militer.²⁷

Literatur terakhir ditulis oleh Peter Chalk dalam buku “*The Latin American Drug Trade: Scope, Dimensions, Impact, and Response.*” Penulis berargumen bahwa di perbatasan utara Meksiko terjadi perang narkoba akibat semakin banyaknya perdagangan narkoba dan fragmentasi geng atau kelompok kejahatan.²⁸ Salah satu kebijakan Meksiko, yaitu Merida Initiative yang telah dirumuskan dinilai tidak dapat mengatasi kesenjangan antara polisi federal dengan polisi lokal, di mana membuat terhambatnya bantuan keamanan di tingkat kota. Selain itu, pengelolaan dana negara yang disetujui oleh kongres tidak dicairkan seluruhnya sehingga membuat banyak program bantuan di Meksiko tidak dapat diimplementasikan secara efektif.²⁹

Berdasarkan kajian literatur, penulis melihat bahwa di Meksiko memang terjadi kelemahan fungsi negara dalam menjalankan kewajibannya, di mana berdampak terhadap banyak hal, baik kepada masyarakat maupun negara lain. Meskipun begitu, terdapat hal lain yang membuat negara tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, yaitu ketika dalam proses penyediaan produk politik negara tidak hadir secara penuh dan intensif. Ketika negara tidak secara tegas menunjukkan kekuasaannya dalam proses penyelenggaraan pemerintah, maka kekosongan tersebut

²⁷ Ibid.

²⁸ Peter Chalk, “U.S. Responses,” dalam *The Latin American Drug Trade: Scope, Dimensions, Impact, and Response*, (California: RAND Corporation, 2011), <http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg1076af.14>.

²⁹ Ibid.

akan diisi oleh aktor-aktor non-negara sehingga membuat berbagai faktor yang telah dipaparkan pada kajian literatur terjadi dan dinormalisasi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan konsep *fragile state*. Lothar Brock et al. dalam tulisannya yang berjudul “*fragile states*” mendefinisikan bahwa *fragile state* merupakan kondisi ketika suatu negara kehilangan efektivitas dan legitimasi dalam menjalankan fungsinya.³⁰ Negara tidak mampu untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif sehingga membuat hilangnya legitimasi. Legitimasi ini datang dari masyarakat yang menilai bahwa kewenangan atau kebijakan dari pemerintah merupakan suatu hal yang bersifat sah dan adil. Struktur dari kelembagaan dan administrasi yang bersifat korup dan tidak efektif membuat adanya celah terhadap implementasi peraturan. Aturan hukum yang telah dibuat tidak diterapkan secara merata, melainkan melalui pemaksaan selektif.³¹ Hal ini akhirnya membuat negara memiliki tingkat legitimasi yang rendah karena tidak mampu menjalankan struktur hukum dan negara dengan baik.

Pada kondisi *fragile state*, terdapat sektor-sektor negara yang tidak koheren atau tidak saling terhubung, misalnya yaitu perekonomian.³² Ekonomi pada skala nasional itu sendiri menjadi sektor yang penting karena dapat memastikan ketersediaan dan keberlanjutan dari dasar-dasar

³⁰ Lothar Brock et al., *Fragile States* (Cambridge: Polity Press, 2012), 16.

³¹ Ibid, 18.

³² Ibid, 16.

kesejahteraan. Selain berdampak kepada taraf hidup masyarakat, ekonomi nasional juga memberikan sejumlah sumber daya yang membuat negara dapat berjalan dengan efektif. Meskipun memberikan dampak positif pada berbagai hal, *fragile state* kurang mampu memastikan koherensi pada sektor ekonomi negara, misalnya terkait dengan pertanian, sektor informal, hingga industri modern yang sebenarnya dapat saling memberikan ketergantungan satu sama lain, baik dalam skala domestik maupun internasional.³³

Selain keterkaitan pemerintah dalam menjamin kehidupan masyarakat, kondisi *fragile state* juga dapat hadir dari sisi masyarakat. Keterkaitan antar masyarakat sebagai komunitas suatu negara memberikan dampak kepada keberlangsungan negara. Ketika negara tidak mampu memastikan hak-hak warga negara untuk terpenuhi, maka masyarakat akan berpaling kepada tokoh-tokoh lokal yang dapat mewakili kelompoknya, misalnya terkait dengan etnis atau suku, keagamaan, atau karakteristik lainnya³⁴. Hal ini menciptakan terpecahnya populasi dalam suatu negara menjadi kelompok-kelompok tertentu yang terikat dalam suatu komunitas. Pada akhirnya, ikatan masyarakat sebagai warga negara menjadi lemah karena adanya ikatan komunitas yang lebih kuat.³⁵

Selain Lothar Brock et al., kondisi negara seperti ini juga dijelaskan oleh Eghosa E. Osaghae dalam tulisannya yang berjudul

³³ Ibid, 17.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid, 18.

“*fragile states*,” di mana ia menjelaskan enam karakteristik dari *fragile state*, yakni:

1. Lembaga politik yang lemah, tidak efektif, dan tidak stabil sehingga menciptakan tata kelola pemerintah yang buruk dan tidak kondusif dengan hilangnya otonomi negara serta muncul tindakan privatisasi negara, kekuasaan pribadi, dan eksklusivisme.
2. Munculnya ‘*ungoverned territories*’ atau wilayah yang tidak diperintah akibat dari ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan yurisdiksi atas wilayahnya.
3. Krisis legitimasi akibat permasalahan kohesi nasional, perebutan kewarganegaraan, tindak kekerasan dalam menguasai negara, hingga perpindahan warga negara, misalnya arus pengungsi, tindakan separatis, atau akibat dari perang saudara.
4. Populasi negara yang tidak stabil dan terpecah belah, di mana banyak terjadi perselisihan yang mengakibatkan lemahnya kesetiaan masyarakat kepada negara.
5. Kurang berkembangnya lembaga pengelola dan penyelesaian konflik, di mana membuat konflik-konflik yang terjadi sulit untuk diartikulasikan dan mencapai titik terang.
6. Tingginya aksi korupsi, kemiskinan, serta rendahnya tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berdampak kepada kurangnya kemampuan fiskal dalam menjalankan fungsi negara.³⁶

³⁶ Eghosa E. Osaghae, “Fragile states,” *Development in Practice* 17, no. 4-5 (2007): 692-693, DOI: 10.1080/09614520701470060.

Karakteristik yang dimiliki oleh suatu negara, di mana terindikasi dalam kondisi *fragile state* memberikan dampak kepada banyak hal, bukan hanya *intrastate* tetapi juga *interstate*. Ketidakstabilan, kerapuhan, atau kerentanan yang dimiliki oleh suatu negara juga menjadi bahaya bagi negara lain.³⁷ Buruknya tata kelola pemerintah akan mendorong terjadinya perang saudara, konflik bersenjata, dan perpindahan penduduk yang menciptakan masalah bukan hanya terkait pengungsi tetapi juga kemanusiaan.³⁸ Perpindahan penduduk ini yang kemudian menjadi ancaman bagi perdamaian global, keamanan, dan kesejahteraan.

Dari keenam karakteristik tersebut, maka dapat dikaitkan kepada kondisi kegagalan negara atau *state failure*. Robert Rotberg dalam tulisannya yang berjudul “*The new nature of nation-state failure*” menjelaskan bahwa *state failure* terjadi ketika negara-bangsa tidak mampu lagi menyediakan produk politik terhadap masyarakatnya.³⁹ Produk politik yang seharusnya dapat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat meliputi dan tidak terbatas pada keamanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan ekonomi, pengawasan lingkungan, kerangka hukum seperti ketertiban dan sistem peradilan untuk mengaturnya, serta infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas komunikasi.⁴⁰ Ketika negara mengalami kegagalan, maka produk politik tidak dapat disediakan dan disalurkan sebagaimana harusnya. Hal ini lambat laun membuat

³⁷ Ibid, 693.

³⁸ Ibid, 696.

³⁹ Rotberg, 85.

⁴⁰ Ibid, 87.

pemerintah kehilangan legitimasinya karena masyarakat yang bersifat plural dan terus mengalami perkembangan akan membutuhkan banyak produk politik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Saat negara kehilangan legitimasinya, maka akan ada aktor non-negara yang berusaha mengisi posisinya. Melemahnya otoritas negara membuat kejahatan banyak terjadi, seperti perdagangan senjata dan narkoba yang menjadi lebih umum. Selain itu, banyak dari geng dan sindikat kriminal berusaha untuk mengontrol dan menguasai sebagian wilayah negara dengan membangun aparat keamanannya sendiri hingga mengatur alur perdagangan.⁴¹ Hal ini dapat terjadi karena pemerintah turut ikut serta menjadi “penjahat” bagi rakyat, misalnya yaitu maraknya penindasan. Karena hal ini terjadi, kekuatan dari institusi kepolisian pun akhirnya lumpuh. Keamanan masyarakat di dalam negara tidak ada lagi yang melindungi, pada akhirnya negara pun mulai mengalami kejatuhan.⁴²

Aktor non-negara yang muncul misalnya yaitu kartel. Kartel sendiri merupakan entitas perdagangan narkoba yang memiliki tujuan untuk menghasut masyarakat demi menyesuaikan kepentingan miliknya melalui teknik propaganda.⁴³ Propaganda yang dilakukan oleh kartel narkoba dilakukan untuk memengaruhi dan memanipulasi publik, lawan kartel, dan juga Pemerintah Meksiko. Sehingga, di Meksiko sendiri kartel

⁴¹ Ibid, 89.

⁴² Ibid, 87.

⁴³ America Y. Guevara, “Propaganda in Mexico’s Drug War,” *Journal of Strategic Security* 6, no. 3 (2013): 131.

dapat menjalin hubungan dengan anggota-anggota pemerintah atau aparat penegak hukum melalui sejumlah tindakannya seperti aksi suap.⁴⁴

Akibat dari kebijakan *war on drugs* yang banyak melibatkan kekerasan, kartel-kartel di Meksiko mengalami evolusi dari yang sebelumnya merupakan kelompok kriminal menjadi kelompok kriminal dengan kemampuan untuk melakukan operasi intelijen, penegakan hukum, dan propaganda.⁴⁵ Kartel narkoba di Meksiko mampu untuk memudarkan batas-batas antara kriminalitas, pemberontakan, dan terorisme.⁴⁶ Kartel mampu untuk menciptakan pemberontakan dan melakukan penculikan atau eksekusi kepada pejabat pemerintah agar terjadi perubahan struktur kekuasaan yang menyesuaikan kebutuhan kartel. Karena hal ini semakin sering terjadi, maka sistem pemerintahan Meksiko menjadi terkikis.⁴⁷

Karena dilihat memiliki sifat agresif, maka pada saat ini banyak kartel yang mampu untuk masuk ke dalam struktur kekuasaan pemerintah tanpa menunjukkan kekerasan seperti sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa banyak aksi suap atau korupsi terjadi. Korupsi adalah tindakan *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadi.⁴⁸ Makna dari korupsi itu sendiri bukan hanya terjadi kepada tindakan yang menyalahi aturan hukum, tetapi juga dapat dilabeli kepada tindakan yang tidak bermoral.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid, 132.

⁴⁶ Ibid, 133.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Robert Hughes, "CORRUPTION," dalam *Passage of Change: Law, Society and Governance in the Pacific*, ed. Anita Jowitt dan Tess Newton Cain (Canberra: ANU Press, 2010), 35, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt24h3jd.11>.

Aksi korupsi merupakan salah satu ancaman terhadap demokrasi karena menciptakan adanya ketidakstabilan dan terjadi di atas ketidaksetaraan sosial.⁴⁹

Korupsi menjadi permasalahan terbesar pada sektor sosial, budaya, dan ekonomi suatu negara bangsa karena kehadirannya sulit untuk dideteksi dan dihilangkan. Tindakan ini memiliki kemampuan untuk mengikis hak asasi manusia yang seharusnya dimiliki oleh setiap masyarakat.⁵⁰ Karena merupakan penyalahgunaan kekuasaan, maka korupsi juga bersifat kontraproduktif terhadap banyak kegiatan, terutama dalam hal bisnis.⁵¹ Sehingga, korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan karena ketika setiap tindakan korupsi dilakukan, maka itu akan mendevalusi atau menurunkan nilai-nilai setiap lembaga terkait dan memunculkan penilaian yang buruk dari masyarakat.⁵²

Tindakan korupsi banyak dilakukan untuk mempermudah kegiatan kartel dalam melakukan perdagangan narkoba. Narkoba sendiri merupakan Narkotika dan Obat-obatan yang merupakan zat atau obat yang didapat dari tanaman.⁵³ Dapat berupa sintetis atau semi-sintetis dan memberikan beberapa dampak bagi tubuh, misalnya menurunkan rasa sakit atau nyeri dan menurunkan kesadaran. Beberapa jenis dari narkoba ini boleh digunakan dengan menggunakan resep dokter, artinya adalah dalam proses

⁴⁹ Ibid, 36.

⁵⁰ Ibid, 45.

⁵¹ Ibid, 43.

⁵² Ibid, 44.

⁵³ Andreas, John Calvin, dan Viony Kresna, "Tindakan hukum bagi penyusup di bidang narkoba," *Binamulia Hukum* 7, no.2 (2018), <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.319>.

produksi, distribusi, dan proses konsumsi harus berada di bawah pengawasan dokter dan lembaga terkait. Akan tetapi, banyak yang menyalahgunakannya dan justru memperdagangkan narkoba dalam skala besar.⁵⁴

Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah bagi banyak negara karena membuat penggunanya memiliki ketergantungan. Dosis yang berlebihan akan mengakibatkan kelainan pada tubuh pengguna. Sehingga, narkoba yang dikonsumsi bukan untuk pengobatan sangat berbahaya karena menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis.⁵⁵ Oleh karena itu, di banyak negara produksi, distribusi, dan konsumsi dari narkoba diawasi secara ketat oleh hukum.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji kegagalan Meksiko sebagai negara dalam menghadapi kehadiran kartel narkoba adalah metode kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan memahami suatu permasalahan atau peristiwa.⁵⁶ Aktor yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah manusia sebagai individu atau secara berkelompok seperti dalam hubungan sosial.⁵⁷ Dalam menerapkan metode kualitatif, maka

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2014), 4.

⁵⁷ Ibid.

interpretasi penulis digunakan terhadap analisis gambar dan tabel serta informasi lainnya.⁵⁸ Sehingga, pada penelitian ini akan bersifat deskriptif, di mana berfokus kepada makna dan pemahaman penulis.

Metode penelitian ini menggunakan *narrative analysis* yang mengedepankan proses penelitian sebagai sebuah ‘cerita.’⁵⁹ Metode ini memungkinkan penulis untuk memahami bagaimana dan mengapa suatu peristiwa sosial dapat terjadi. Melalui *narrative analysis*, penulis dapat meneliti data-data terkait dengan berbagai hal, misalnya isu-isu identitas, dengan melihat interaksi antar aktor yang terjadi di dalamnya. Sehingga, metode ini memungkinkan penulis untuk dapat mengeksplorasi fenomena sebagai sebuah ‘cerita’ dengan melihat konstruksi identitas yang dimilikinya sebagai representasi suatu isu.⁶⁰

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada metode penelitian kualitatif, terdapat sumber data primer dan sekunder yang dapat digunakan sebagai bahan analisis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka seperti artikel jurnal, buku, dan juga pemberitaan dari media yang relevan dan terpercaya. Studi pustaka yang dilakukan juga menerapkan teknik triangulasi atau referensi silang, di mana dilakukan untuk memperoleh hasil data atau analisis yang kredibel dan tidak bias.

⁵⁸ Ibid, 14.

⁵⁹ Sarah Earthy dan Ann Cronin, "Narrative analysis," dalam *Researching social life 3rd edition*, ed. N. Gilbert (London: Sage, 2008).

⁶⁰ Ibid.

1.7 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan tentang penjelasan awal mengenai penelitian. Bagian ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang besarnya aktivitas dari kartel narkoba yang bukan hanya dilakukan di dalam Meksiko, tetapi juga secara internasional menjalin kerja sama dengan beberapa kelompok kriminal terorganisasi lain di sejumlah negara. Untuk menjawab hal tersebut, bagian ini juga membahas intervensi Pemerintah Meksiko melalui kebijakan-kebijakan sebagai upaya penanganan dari kegiatan yang dilakukan oleh kartel karena telah memberikan dampak kepada keamanan di Meksiko.

Bab III menjelaskan tentang dampak dari hubungan kedua unit analisis, yaitu Pemerintah Meksiko dengan kartel. Memahami kegagalan Pemerintah Meksiko dalam menyediakan produk politik. Kegagalan tersebut disebabkan oleh kekuasaan kartel yang dapat melemahkan otoritas pemerintah sehingga turut berdampak kepada berbagai sektor penting negara. Karena kegagalan pemerintah dalam menyediakan produk politik, maka masyarakat dihadapkan dengan sejumlah situasi yang sangat merugikan.

Bab IV berisi penutupan dari penelitian ini. Penulis menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian.